



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

RAPAT KOMISI IX DPR RI

(Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Ketenagakerjaan RI, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan))

Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Persidangan	: IV
Rapat ke	: 4 (empat)
Jenis Rapat	: Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dilaksanakan secara tatap muka dan virtual
Dengan	: 1. Menteri Ketenagakerjaan RI; 2. Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI); 3. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan; 4. <i>Project Management Office (PMO) Kartu Prakerja</i>
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Selasa, 16 Maret 2021
Pukul	: 10.00 WIB – selesai
Acara	: 1. <i>Grand design</i> Kementerian Ketenagakerjaan RI dan Bappenas dalam Penciptaan dan Pemenuhan Pasar Kerja Tahun 2021 di masa Pandemi Covid-19; 2. Sinergitas Kementerian Ketenagakerjaan RI dengan lintas Kementerian terkait perlindungan, pemulangan dan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai dampak pandemi Covid-19; 3. Pembahasan Program Kartu Prakerja; 4. Kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan RI terkait pengupahan pasca terbitnya PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang "Pengupahan".
Ketua Rapat	: Felly Estelita Runtuwene, SE. / Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat	: Suryatna, S.IP./ Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I Lt.1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat

- Peserta Rapat
Hadir dan Virtual
- A. Fisik 17 orang Virtual 19 orang dari 50 orang Anggota Komisi IX DPR RI;
 - B. Menteri Ketenagakerjaan RI: DR. Hj. Ida Fauziah, M.Si., beserta jajaran;
 - C. Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) diwakili Sestama: Drs. Tatang Budie Razak, MBA. beserta jajaran;
 - D. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan: Anggoro Eko Cahyo, beserta jajaran;
 - E. *Project Management Office (PMO)* Kartu Prakerja/ Direktur Eksekutif Management Pelaksana Program Kartu Prakerja: Denny Puspa Purbasari beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri Ketenagakerjaan RI, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, *Project Management Office (PMO)* Kartu Prakerja, dibuka pukul 10.20 WIB., dilaksanakan secara tatap muka dan virtual, sesuai dengan Ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, rapat telah memenuhi kuorum dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan untuk:
 - a. Menyusun dan menerapkan *grand design* sistem informasi dan pelayanan pasar kerja;
 - b. Meningkatkan sinergitas dengan BP2MI, BPJS Ketenagakerjaan dan pihak terkait dalam rangka meningkatkan perlindungan, pemulangan dan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai bagian dari upaya penanggulangan dampak pandemi Covid 19;
 - c. Meningkatkan sosialisasi kebijakan pengupahan pasca terbitnya PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan kepada masyarakat luas.
2. Komisi IX DPR RI mendesak BP2MI untuk:
 - a. Terus meningkatkan pelayanan kepelungaan PMI yang bermasalah di masa pandemi Covid 19;
 - b. Memfasilitasi pemulihan ekonomi purna PMI;
 - c. Mencari solusi terkait berbagai permasalahan dalam penempatan PMI dimasa pandemi Covid 19 termasuk mencari negara penempatan PMI sehingga dapat mengurangi penempatan PMI Non Prosedural;
 - d. Membentuk UPT BP2MI di daerah basis PMI berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI dan Kementerian PAN RB

3. Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Ketenagakerjaan untuk:
 - a. Meningkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari unsur PMI;
 - b. Meningkatkan pengelolaan iuran kepesertaan dalam rangka memberikan manfaat kepada PMI;
 - c. Melakukan terobosan baru dalam rangka menciptakan program-program inovatif dalam jaminan sosial tenaga kerja yang dapat menjawab berbagai tantangan aktual dunia kerja.

4. Komisi IX DPR RI mendesak PMO Program Kartu Prakerja untuk:
 - a. Mensosialisasikan Program Kartu Prakerja kepada masyarakat luas terutama tentang cara mendapatkan kepesertaan, manfaat dan pelatihan-pelatihan yang disediakan;
 - b. Meningkatkan sinergi dengan pihak-pihak terkait/stakeholder untuk lebih memberikan manfaat dan daya guna program kartu prakerja bagi masyarakat.

5. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Ketenagakerjaan RI, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Direksi BPJS Ketenagakerjaan dan Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja untuk memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan Anggota Komisi IX pada rapat hari ini, selambat-lambatnya tanggal 23 Maret 2021.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 18.40 WIB.

Jakarta, 16 Maret 2021

KETUA RAPAT/
KETUA KOMISI IX DPR RI,



FELLY ESTELITA RUNTUWENE, SE.
A-393